



# KONGRES KEBUDAYAAN 1991

Jakarta, 29 Oktober - 3 November 1991

PANITIA KONGRES KEBUDAYAAN 1991



# KONGRES KEBUDAYAAN 1991

Jakarta, 29 Oktober - 3 November 1991

HASIL RUMUSAN  
KONGRES KEBUDAYAAN 1991

PANITIA KONGRES KEBUDAYAAN 1991

## KATA PENGANTAR

Laporan dan rumusan hasil Kongres Kebudayaan 1991 ini disusun sebagai perwujudan peran serta segenap peserta Kongres yang dengan semangat yang tinggi disertai kerinduan untuk menghasilkan kesepakatan bersama yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa. Penulisan laporan perumusan hasil Kongres itu berlangsung dalam suasana keterbukaan yang penuh tanggung jawab, kejujuran dan persahabatan. Akan tetapi karena keterbatasan waktu untuk membicarakan secara lebih rinci, rumusan ini dapat dikatakan "asli" dalam arti spontan dan mencerminkan pemikiran peserta Kongres tanpa bias kata bersandang. Laporan asli dan rumusan hasil Kongres ini telah dibacakan oleh saudari Christine Hakim di hadapan Wakil Presiden Bapak Sudharmono, SH., pada kesempatan Penutupan Kongres Kebudayaan 1991 pada hari Sabtu, 2 Nopember 1991 secara resmi di Sasana Langen Budhoyo — Taman Mini Indonesia Indah Jakarta.

Untuk kepentingan penerbitan ini, rumusan asli hasil Kongres Kebudayaan 1991 telah mengalami perbaikan redaksional seadanya, terutama untuk meluruskan kalimat-kalimat pada bagian-bagian tertentu baik pada pengantar, hasil pemikiran dan penutup. Untuk tidak mengurangi bobot pembicaraan dalam Kongres, akan tetapi tidak harus merubah rumusan hasil Kongres, dalam laporan ini disertakan lampiran 1) Amanat Presiden Pada Upacara Pembukaan Kongres Kebudayaan 1991; 2) Sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia Pada Penutupan Kongres Kebudayaan 1991; 3) Pengantar Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Pada Kongres Kebudayaan 1991 dalam Sidang Pleno I; 4) Laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pada Acara Pembukaan Kongres Kebudayaan 1991; 5) Laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Pada Acara Penutupan Kongres Kebudayaan 1991; 6) Catatan (Rumusan) Sidang Kelompok I sampai dengan Kelompok V; 7) Pokok Masalah dan topik pembicaraan yang dibahas di dalam Kongres Kebudayaan 1991; dan 8) Struktur organisasi dan Panitia Kongres Kebudayaan 1991.

Semoga penerbitan laporan dan hasil Kongres Kebudayaan 1991 ini dapat menjadi landasan pemikiran dan peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan budaya selanjutnya. Mudah-mudahan semangat dan kemampuan berperan serta masyarakat itu dapat terwujud dalam pembinaan dan pengembangan kebudayaan bangsa dengan mengacu pada pengalaman kemarin, menghadapi hari kini menyongsong hari depan penuh kejayaan.

## LAPORAN TENTANG KONGRES KEBUDAYAAN 1991

Kongres Kebudayaan 1991, yang dihadiri oleh kurang-lebih seribu budayawan, ilmuwan, cendekiawan, seniman, sastrawan, pemangku adat, ulama, pendidik, wartawan, dan pejabat pemerintah dari seluruh wilayah negara kita, dibuka dengan resmi oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Soeharto, di Sasono Langen Budhoyo, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, pada hari Selasa, Tanggal, 29 Oktober 1991.

Pada Upacara Pembukaan Kongres disampaikan penjelasan tentang sifat dan tujuan kongres, yang juga harus ditanggapi sebagai salah satu kegiatan kebudayaan dalam Dasawarsa Kebudayaan 1987 – 1997, oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. Dr. Fuad Hassan.

Bapak Presiden menyampaikan amanat yang menyatakan harapan beliau agar kongres dapat mengumpulkan pemikiran-pemikiran berkenaan dengan pengembangan kebudayaan oleh bangsa Indonesia di masa depan.

Pada sidang Pleno I Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Bapak Soepardjo Roestam, selaku Ketua Panitia Nasional Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan 1987 – 1997, menjelaskan Dasawarsa Kebudayaan 1987 – 1997 yang merupakan hasil kesepakatan negara-negara anggota Persekutuan Bangsa-Bangsa.

Pembicara utama pada Sidang Pleno I adalah Prof. Mr. Dr. Sutan Takdir Alisyahbana yang menyampaikan uraian tentang "*Sejarah Kebudayaan Indonesia Masuk Globalisasi Umat Manusia*"; Prof. Dr. Umar Khayam yang menyampaikan uraian tentang "*Kebudayaan Indonesia, Kebudayaan Baru*"; Bapak Barnabas Suebu, SH yang menyampaikan uraian tentang "*Kontak-Kontak Budaya Dalam Pembinaan dan Pengembangan Budaya Bangsa*"; dan Ir. Nirwan Dewanto yang menyampaikan uraian tentang "*Kebudayaan Indonesia: Pandangan Seorang Penyair*".

Panitia

**RUMUSAN HASIL KONGRES KEBUDAYAAN 1991**

## RUMUSAN HASIL KONGRES KEBUDAYAAN 1991

### PENGANTAR

Kongres Kebudayaan 1991, menurut penilaian semua pihak, diselenggarakan pada waktu yang tepat. Dikatakan demikian karena dewasa ini bangsa Indonesia tengah menghadapi berbagai perubahan, baik yang terjadi sebagai akibat pengaruh dari dalam maupun dari luar. Ini menuntut penegeran jati diri.

Jati diri bangsa Indonesia dibangun dari pengalaman sejarah dan kerangka acuan Nasional yang tercermin dalam dasar dan pandangan hidup bangsa, yaitu Pancasila seperti yang tercantum dalam "*Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945*". Dasar dan Pandangan hidup bangsa Indonesia itu secara historis dan ideologis terbuka dan berketuhanan Yang Maha Esa.

Jati diri yang terbuka itu sangat diperlukan untuk menghadapi perubahan dan tantangan jaman yang pada gilirannya dapat diubah menjadi kesempatan untuk membangun bangsa yang maju, modern, demokratis, dan tangguh kebudayaannya.

Keterbukaan sangat diperlukan untuk membangkitkan kreativitas, prakarsa, swakarsa, dan partisipasi masyarakat sehingga dengan demikian hal itu juga akan memperbesar tanggung jawab sosial. Melalui keterbukaan itu pula Kedaulatan Rakyat, yang menjadi prinsip utama Undang-Undang Dasar 1945, harus semakin dapat diwujudkan.

Kebudayaan Indonesia harus sanggup membangun bangsa Indonesia yang tangguh, tegar, disiplin, dan ulet agar ilmu pengetahuan dan teknologi modern dapat direbut dan dikuasai. Dengan demikian, bangsa Indonesia akan sanggup bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang telah maju.

Dalam kebudayaan Indonesia nilai dan rasa keadilan sangat mempengaruhi semangat hidup bersama. Oleh karena itu, nilai dan rasa keadilan itu harus diwujudkan dalam segala bidang kehidupan dengan jalan menegakkan asas negara hukum serta mendayagunakan perangkat-perangkat pelaksanaan dan pengawasannya.

Tantangan pembangunan dan perubahan yang kita hadapi itu menuntut agar kita memiliki kebudayaan yang berorientasi ke hari esok. Sehubungan

dengan hal itu, bahasa Indonesia, sebagai salah satu wahana pokok kebudayaan, harus digunakan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan Indonesia dalam segala perwujudannya seperti yang terungkap dalam Kongres Kebudayaan 1991, menjadi tanggung jawab kita bersama.

Tanggung jawab itu hendaknya dapat terwujud dalam peningkatan peran serta masyarakat guna memajukan kebudayaan bangsa melalui berbagai cara dan wahana yang tersedia, sebagaimana yang tercantum di dalam hasil Kongres sebagai berikut :

## HASIL PEMIKIRAN

Pembicaraan dalam kongres diselenggarakan melalui 5 (lima) kelompok yang bersama-sama menghasilkan pemikiran-pemikiran pokok sebagai berikut :

### I. Tentang Warisan Budaya : Penyaringan dan Pemeliharaan.

- a. Pemeliharaan dan pelestarian warisan budaya nasional dan budaya daerah, yang harus ditanggapi lebih sebagai daya kemampuan yang dapat dimanfaatkan daripada ancaman yang merugikan harus dilakukan tanpa harus bertahan pada nilai-nilai dan aturan-aturan tradisional yang tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa dan negara kita.
- b. Peranan kebudayaan daerah dalam kehidupan masyarakat pendukungnya harus tetap dihargai dan dilestarikan tetapi dengan cara pengembangan kebiasaan para pendukungnya demi persatuan bangsa, mewujudkan perilaku yang berpedoman pada kebudayaan nasional dalam hubungan antar golongan yang berbeda kebudayaan.
- c. Pelestarian kegiatan-kegiatan, barang-barang kesenian dan kerajinan serta peninggalan sejarah harus diusahakan melalui pembangunan prasarana, sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan yang berkenaan dengan cagar budaya; serta pengembangan kebiasaan untuk bekerja dengan teliti sesuai dengan tuntutan tradisi budaya yang bersangkutan. Pengembangan kegiatan-kegiatan dan barang-barang kesenian dan kerajinan harus diusahakan melalui penciptaan keadaan yang memungkinkan terwujudnya bentuk baru yang baik dan dapat diterima sebagai bentuk-bentuk kebudayaan yang wajar.

- d. Aturan-aturan adat berkenaan dengan kekuasaan dan kepemilikan perlu disesuaikan dengan tuntutan masyarakat modern tetapi dengan tetap memperhatikan manfaat yang terkait pada aturan-aturan adat yang berkenaan dengan rasa keadilan anggota-anggota masyarakat yang bersangkutan.
- e. Warisan budaya agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa perlu ditafsirkan secara rasional dengan tetap berdasarkan ajaran yang diamanatkan dalam kitab suci agama yang bersangkutan agar lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat yang sedang berusaha menjadi masyarakat yang lebih moderen dengan tetap mempertahankan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa.

## II. Tentang Kebudayaan Nasional : Kini dan Masa Depan

- a. Kebudayaan daerah dan kebudayaan nasional harus ditanggapi sebagai dua jenis kebudayaan dengan ciri-ciri khas masing-masing tetapi diharapkan saling mendukung sehingga manusia Indonesia di masa depan memperoleh kepribadian terutama dari kebudayaan daerah asal masing-masing tetapi juga memperoleh kepribadian sebagai manusia modern terutama dari kebudayaan nasional.
- b. Perkembangan kebudayaan nasional harus diarahkan pada tujuan nasional, yaitu masyarakat yang dalam kenyataan sepenuhnya berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat yang terdiri atas manusia-manusia yang berbudaya, bebas dari kebodohan dan kemiskinan dan sekalian jenis tindakan yang menurunkan martabat seseorang sebagai manusia, seperti penghinaan dan penindasan.
- c. Kesusastraan Indonesia yang seharusnya merupakan bagian yang amat penting dari kebudayaan nasional, harus dikaji dan diperjelas demi memudahkan usaha mengatasi kelemahan yang kini mewujudkan kemiskinan kritik sastra, serta kandasnya majalah sastra dan ruang sastra di surat-surat kabar.
- d. Media massa harus dimanfaatkan sebanyak mungkin untuk menyebarluaskan kebudayaan nasional, yang harus dibedakan dari kebudayaan daerah, di kalangan penduduk di wilayah negara kita. Unsur-unsur kebudayaan daerah tertentu dapat juga diperkenalkan di daerah-daerah lain dengan penggunaan media massa asal penduduk di daerah-daerah lain ini tidak menanggapi penyiaran yang bersangkutan sebagai paksaan terhadap mereka.

e. Karena kebudayaan suatu bangsa sangat menentukan sifat-sifat kepribadian anggota-anggota bangsa yang bersangkutan, sehubungan dengan itu pendidikan merupakan suatu jenis upaya yang ampuh dalam membentuk kepribadian. Untuk itu perlu diusahakan saling keterikatan yang lebih erat antara kebudayaan nasional, termasuk nilai-nilai yang menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi moderen, serta penjabaran sistem pendidikan nasional.

### **III. Tentang Daya Cipta dan Perkembangan Kebudayaan**

a. Daya Cipta para seniman, baik yang menghasilkan karya-karya seni yang bernilai budaya tinggi maupun yang menghasilkan barang-barang yang digunakan sehari-hari tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan akan rasa indah, perlu senantiasa dirangsang dan dibantu perkembangannya agar menghasilkan pertumbuhan kesenian daerah dan nasional yang berlangsung terus-menerus dan semakin tinggi nilai keindahannya.

b. Para seniman harus memiliki keleluasaan untuk menghasilkan karya kebudayaan yang dinilai atas dasar keindahan yang diwujudkan dan bukan hanya atas dasar komersial.

c. Dalam masyarakat moderen, ilmu pengetahuan dan teknologi menempati bagian yang semakin besar dan penting dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan, oleh sebab itu daya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu senantiasa dipupuk dalam pertumbuhan kebudayaan di Indonesia.

d. Daya cipta budaya perlu sebanyak mungkin memanfaatkan media massa, yang diharapkan dikelola dengan penuh kesadaran sosial dan tanggung jawab moral untuk menyebarkan unsur-unsur baru kebudayaan nasional dan untuk mengurangi kesenjangan antara kebudayaan elite dan kebudayaan rakyat.

e. Kemampuan generasi muda untuk menghasilkan bentuk-bentuk karya yang baru sebagai sumbangan generasi yang bersangkutan pada perkembangan kebudayaan harus dipupuk dan dibina, yang dimulai sedini mungkin.

f. Daya cipta dan pertumbuhan kesusasteraan daerah dan nasional harus dikembangkan dengan membangun prasarana dan sarana yang dibutuhkan

untuk mendukungnya, seperti penyunting, penerbit, percetakan, toko buku dan perpustakaan, serta minat dan kemampuan para anggota masyarakat untuk menjadi pembaca.

#### IV. Tentang Kebudayaan dan Sektor-sektor Kehidupan Masyarakat

- a. Kebudayaan yang dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan dan pengembangan kegiatan ekonomi harus dapat menghasilkan suatu keadaan yang memungkinkan semua golongan dalam masyarakat kita dapat mencari nafkah dengan penghasilan yang layak serta dapat merangsang anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan mereka sebesar-besarnya tanpa mengabaikan tanggungjawab sosial masing-masing.
- b. Kebudayaan yang kita kembangkan harus dapat merangsang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi moderen dengan tetap memperhatikan tanggungjawab moral terhadap lingkungan, masyarakat setempat, bangsa dan negara.
- c. Kebudayaan yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan sosial dan politik harus senantiasa sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, kehidupan berbangsa dan bernegara hendaknya tidak semata-mata diselenggarakan dengan menggunakan bahasa perundang-undangan melainkan juga menggunakan pendekatan kebudayaan.
- d. Kebudayaan yang dijadikan pedoman dalam bidang pertahanan dan keamanan, yang tumbuh dari pengalaman dalam masa Revolusi Nasional dan upaya menegakkan keamanan dan ketertiban di seluruh wilayah Republik kita, harus dikembangkan lebih lanjut agar sesuai dengan tuntutan masalah-masalah yang akan dihadapi di masa depan dan yang akan jauh lebih sulit diatasi daripada tuntutan masalah-masalah yang dihadapi di masa lampau.
- e. Kebudayaan yang dijadikan acuan oleh penduduk di kepulauan kita yang amat luas dalam menentukan hak dan kewajiban antara pria dan wanita harus mengandung asas persamaan derajat yang terutama terwujud sebagai kemitraan antara suami dan istri, dua manusia yang sama-sama bermartabat.

f. Kebudayaan penduduk di tanah air kita harus kembali mendorong para pendukungnya untuk menanggapi lingkungan alam, tidak hanya sebagai sumberdaya yang dapat dimanfaatkan melainkan juga sebagai ciptaan Tuhan yang harus dikelola secara bijaksana ke arah pelestarian dan pemantapan kearifan serta ketangguhan kebudayaan bangsa.

## V. Tentang Kebudayaan Indonesia dan Dunia (Ummat Manusia)

a. Kontak-kontak budaya antarbangsa telah meningkat di masa kini dan akan semakin meningkat lagi di masa depan sebagai akibat proses globalisasi. Sikap saling menghargai antarbudaya dan kerjasama kebudayaan perlu ditingkatkan.

b. Pengembangan kebudayaan di luar negeri perlu ditingkatkan dengan berbagai cara dengan memperhatikan tiga taraf pemerolehan budaya: pengenalan, pemahaman, serta penghayatan dan pengamalan. Pengadaan pusat informasi budaya, misi kebudayaan, program pertukaran, pengajaran bahasa Indonesia akan pemanfaatan media massa adalah di antara cara-cara yang dapat digunakan.

c. Pariwisata diharapkan untuk menghasilkan keuntungan ekonomi. Namun dalam usaha pariwisata, pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional harus selalu diperhatikan. Dalam menghindari dampak negatif pariwisata, masyarakat perlu diikutsertakan, di samping diadakannya peraturan-peraturan pemerintah yang mantap. Demikian pula masyarakat berpendapatan rendah dan kelestarian lingkungan perlu selalu mendapat perhatian.

d. Usaha-usaha penerjemahan berbagai karya tulis bermutu perlu sungguh-sungguh ditingkatkan, baik dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia maupun sebaliknya. Usaha-usaha penerjemahan dapat dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun swasta.

## PENUTUP

Di dalam Kongres Kebudayaan 1991 ini juga telah berkembang pembicaraan secara spontan, terbuka dan penuh kejujuran, antara lain tercermin dalam usulan-usulan yang tertuang dalam makalah yang disajikan maupun di dalam diskusi kelima kelompok. Di antaranya ada usulan untuk melembagakan Kongres Kebudayaan dan pengadaan suatu wadah khusus untuk

mengelola masalah kebudayaan; bahkan dalam sidang-sidang kelompok dibicarakan pula usulan pembentukan suatu departemen kebudayaan yang mandiri disertai "Badan Pertimbangan Kebudayaan".

Peresmian penutupan Kongres Kebudayaan 1991, yang dijiwai oleh semangat keterbukaan, kejujuran dan tanggungjawab moral yang tinggi, dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Soedharmono, SH, pada hari Sabtu sore, tanggal 2 November 1991.

Akhirnya Kongres diakhiri dengan doa memanjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, disertai tekad seluruh peserta kongres untuk melaksanakan hasil Kongres Kebudayaan 1991.

**LAMPIRAN — LAMPIRAN**



**SAMBUTAN PRESIDEN  
PADA UPACARA PEMBUKAAN  
KONGRES KEBUDAYAAN NASIONAL 1991  
PADA TANGGAL 29 OKTOBER 1991  
DI TAMAN MINI "INDONESIA INDAH"**

**SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

Saudara-saudara;

Hari ini, dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa kita bersama-sama berkumpul di sini untuk menghadiri pembukaan Kongres Kebudayaan Nasional 1991. Kongres ini saya nilai sangat penting dan diselenggarakan pada saat yang tepat.

Sekarang memang merupakan waktu yang paling tepat bagi kita untuk merumuskan berbagai pemikiran yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkembangan kebudayaan Indonesia. Sebabnya ialah, karena tidak lama lagi bangsa kita akan mulai memasuki era tinggal landas. Dua tahun lagi, tahun 1993, MPR hasil pemilihan umum tahun deppan akan menetapkan GBHN yang baru. GBHN baru itu akan menentukan pola pembangunan bangsa kita selama 25 tahun ke depan. Ini berarti, bahwa dalam dua tahun ini kita harus sudah dapat merumuskan dengan jernih pokok-pokok pikiran mengenai pembangunan bangsa kita selama seperempat abad mendatang.

Dalam menyiapkan GBHN yang baru itu pemikiran-pemikiran mendasar mengenai kebudayaan sangat penting. Lebih-lebih karena era tinggal landas nanti akan berlangsung dalam situasi dunia yang penuh perubahan. Perubahan-perubahan itu sekarang sudah mulai kita rasakan. Di masa depan perubahan-perubahan itu jelas akan lebih cepat lagi, sejalan dengan cepatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perubahan-perubahan yang terjadi itu akan meliputi semua segi kehidupan, yang erat berkaitan dengan perkembangan kebudayaan bangsa kita.

Kongres Kebudayaan Nasional ini juga perlu memantau dan merekam pemikiran-pemikiran konstruktif bagi pengembangan segala daya upaya kita dalam bidang kebudayaan, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang merupakan prakarsa dan swakarsa masyarakat umumnya.

Kita semua menyadari benar, pentingnya makna kebudayaan, terutama untuk memperkokoh jatidiri kita sebagai bangsa. Hal ini juga diyakini oleh para pendahulu kita, para pendiri Republik Indonesia ini, yang melalui UUD '45 secara tegas dan lugas mengamanatkan kepada kita semua untuk memajukan kebudayaan nasional.

Sebagai bangsa yang bertekad untuk melaksanakan kehidupan bernegara secara tertib dan bertanggung jawab, maka amanat yang tersurat dalam UUD '45 itu tidak saja harus dilaksanakan Pemerintah, tetapi juga harus dilaksanakan oleh segenap warga bangsa Indonesia. MPR yang merupakan pengejawantahan rakyat Indonesia juga telah menggariskan dalam GBHN 1988, bahwa: "Kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, rasa dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Dengan demikian pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya". Petunjuk GBHN tadi perlu difahami dan dihayati benar oleh Saudara-saudara semua segenap peserta kongres.

Kita semua juga mengharapkan agar kongres ini dapat mencetuskan gagasan dan merumuskan saran-saran nyata untuk mewujudkan cita-cita bangsa kita itu. Saya yakin bahwa kongres yang diikuti oleh para peserta yang berasal dari berbagai kalangan masyarakat dan datang dari segala penjuru Tanah Air ini akan dapat kita andalkan kemampuan dan kesanggupannya untuk mencapai tujuan tadi.

Saudara-saudara;

Pembangunan jelas memerlukan matra kebudayaan. Menyertakan matra kebudayaan dalam segenap upaya pembangunan itu harus kita serasikan dengan kemajuan yang kita capai dalam bidang-bidang pembangunan lainnya. Penjelasan UUD '45 telah mengamanatkan kepada kita untuk melestarikan "kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan

di daerah-daerah di seluruh Indonesia". Penjelasan UUD '45 juga mengingatkan kita, agar kita bersikap terbuka. Dengan wawasan yang jauh ke depan, kita yang hidup belakangan diingatkan agar "tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia". Semua itu berarti bahwa usaha untuk melestarikan dan memajukan budaya bangsa harus kita laksanakan secara serentak. Kitalah yang harus pandai-pandai memilih apa yang harus kita lestarikan. Kita juga harus secara tepat menapis dan menyaring unsur-unsur budaya asing, sehingga yang berkembang di negeri kita adalah unsur-unsur positif yang mendorong kemajuan budaya dan persatuan bangsa kita.

Dalam hubungan ini kita perlu memperhatikan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dampaknya terhadap perikehidupan kemanusiaan umumnya, khususnya terhadap masyarakat bangsa-bangsa yang sedang membangun. Kita menyadari bahwa penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kunci utama kemajuan. Tetapi kita juga menyadari, bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu tetap merupakan sarana untuk mewujudkan perikehidupan yang lebih baik mutunya, lebih tinggi tingkat kesejahteraannya dan lebih mulia derajat kemanusiaannya. Bukan sebaliknya.

Karena itu, kita harus membangun sikap positif terhadap ilmu pengetahuan sebagai ramuan penting dalam proses memajukan kehidupan bangsa. Untuk itu kita perlu menyiapkan sumber daya manusia yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memanfaatkan hasil-hasilnya untuk kemajuan bangsa kita.

Di lain pihak, kita tidak boleh hanyut dan silau oleh hasil kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita harus tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya yang menegaskan jatidiri kita sebagai bangsa. Kita telah memiliki landasan yang kuat dan pedoman yang jelas untuk memperkokoh jatidiri kita itu, ialah Pancasila.

Bagi kita Pancasila adalah dasar dan sekaligus tujuan kita dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi arah bagi upaya memajukan kebudayaan nasional Indonesia. Dalam upaya kita untuk mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia kita harus selalu waspada terhadap pengaruh-pengaruh dari luar yang dapat merapuhkan sendi-sendi bangunan budaya

kita sendiri dan mengaburkan kesadaran jatidiri kita sebagai bangsa. Dalam rangka itulah kita harus benar-benar memahami makna dari tekad bulat kita yang memandang pembangunan kita itu sebagai pengamalan Pancasila. Melalui upaya pembangunan itulah kita ingin memberi wujud pada nilai-nilai budaya bangsa yang terangkum dalam Pancasila.

Salah satu sumber pengaruh terhadap perkembangan kebudayaan kita berasal dari kemampuan sarana teknologi komunikasi dan informasi yang mutakhir. Daya jangkau sarana ini sangat luas, apalagi dengan makin banyaknya pemanfaatan teknologi satelit dan ruang angkasa untuk memancarkan berbagai acara, baik di bidang politik, ekonomi maupun kebudayaan dan berbagai ragam hiburan. Penilaian masyarakat tentang berbagai hal akan mudah terpengaruh oleh sikap dan selera yang terbentuk oleh bahan pemancaran media komunikasi tadi. Jelas, bahwa pada akhirnya, hal itu akan mempengaruhi sikap dan selera budaya kita, terutama kaum muda. Ini salah satu masalah masa kini yang perlu mendapat perhatian kita semua. Karena itu kiranya dapat dibahas juga dalam persidangan kongres ini.

Saudara-saudara;

Antara Kongres Kebudayaan Nasional 1991 dengan Kongres-kongres Kebudayaan Nasional sebelumnya, terentang masa yang cukup panjang. Karena itu di samping merupakan kesempatan untuk melanjutkan berbagai pembahasan di masa lalu, kongres ini juga perlu mengamati berbagai peristiwa dan gejala yang merupakan penjelmaan masa kini. Dengan demikian, kongres ini tidak hanya sekedar menjadi forum lanjutan kongres sebelumnya, tetapi juga mampu mengamati secara cermat berbagai kenyataan yang timbul di masa kini. Hal itu memberi kesempatan bagi kita untuk memperkaya wawasan bangsa kita ke arah kemajuan kebudayaan nasional Indonesia.

Besar harapan saya agar pembahasan dalam kongres ini tidak semata-mata bercorak akademik, melainkan dapat pula memberi sumbangan pikiran bagi perumusan kebijaksanaan dalam bidang pengembangan kebudayaan dalam arti yang seluas-luasnya. Bahkan, tidak mustahil, hasil-hasil kongres ini menjadi masukan bagi penyusunan GBHN yang akan datang.

Dengan harapan-harapan tadi, dengan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa semoga senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada segala karya

kita, maka akhirnya dengan ini Kongres Kebudayaan Nasional 1991 secara resmi saya nyatakan dibuka.

Terima kasih.

Jakarta, 29 Oktober 1991  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEHARTO



**S A M B U T A N  
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
PADA PENUTUPAN KONGRES KEBUDAYAAN 1991  
TANGGAL 2 NOPEMBER 1991  
DI JAKARTA**

**SEKRETARIAT NEGARA  
SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN RI**



**WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saudara-saudara;

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah Maha Pengasih yang telah memurahkan limpahan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dengan selamat dapat melaksanakan rangkaian persidangan dalam Kongres Kebudayaan 1991 yang sebentar lagi akan kita akhiri.

Sebagaimana telah diutarakan oleh Bapak Presiden pada saat beliau meresmikan dibukanya Kongres ini, penyelenggaraan Kongres Kebudayaan 1991 sekarang ini adalah tepat waktunya. Berbagai masalah kebudayaan memang sudah saatnya menjadi perhatian kita guna dibahas demi pengembangannya di masa depan, apalagi mengingat bahwa kita kini berada di ambang gerbang era pembangunan nasional jangka panjang kedua, yang sekaligus kita hasrati untuk menjadi masa kebangkitan nasional kedua. Hasrat ini tentu tidak terwujud dengan sendirinya, sebaliknya, kita harus secara sadar berikhtiar untuk menjadikannya kenyataan yang semerata mungkin bagi segenap bangsa Indonesia.

Kebangkitan nasional kedua itu tentu saja harus tetap punya ciri khas kebangsaan Indonesia — ciri khas yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila —, sekalipun berlangsung dalam zaman modern yang ditandai oleh kemajuan yang pesat dalam bidang ilmu dan teknologi serta kian meningkatnya frekuensi dan intensitas hubungan antar bangsa dan antar budaya.

Dalam hubungan itu maka Kongres kali ini mendapat maknanya yang istimewa, yaitu antara lain untuk membuatantisipasi yang cermat tentang berbagai kecenderungan perkembangan ke masa depan dan sejalan dengan

itu membuat proyeksi yang sebaik-baiknya berkenaan dengan upaya memajukan kebudayaan nasional Indonesia sebagaimana diamankan oleh pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945.

Upaya pembangunan nasional yang akan kita lanjutkan di masa pembangunan jangka panjang kedua nanti yang tetap berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan sasaran meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia, niscaya akan membawa akibat berupa perubahan dan pembaharuan dalam peri kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada analisa akhirnya hal ini berarti pula kemungkinan terjadinya pergeseran nilai-nilai budaya, yang pada gilirannya akan berdampak terhadap sikap dan perilaku kita dalam menanggapi berbagai tuntutan zaman.

Sebagai satuan budaya kita harus siap menghadapi perubahan zaman dengan segala konsekuensinya, dan kesiapan itu hendaknya dibangun melalui ikhtiar sadar dan tindakan nyata yang senantiasa mementingkan melekatnya matra budaya dalam pembangunan nasional yang bertahap dan berkelanjutan. Setiap tahap pembangunan adalah landasan bagi aktualisasi tahap berikutnya, dan pada setiap tahap harus kita hindarkan terjadinya kesenjangan — apalagi keterasingan — terhadap budaya kita sebagai pengukuh identitas kita sebagai bangsa Indonesia.

Maka apa yang kini menjadi perumusan dalam GBHN 1988, yaitu bahwa "pembangunan nasional merupakan pembangunan yang berbudaya" sesungguhnya merupakan pesan yang semestinya berlaku bukan sementara ini saja, melainkan kelanjutan upaya pembangunan nasional di masa depan. Terlebih lagi mengingat bahwa kewajiban untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia merupakan amanat konstitusional yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk mewujudkannya.

Saya gembira sekali bahwa agenda Kongres ini disusun bukan sekedar berdasarkan abstraksi akademik, melainkan beranjak dari masukan yang dihasilkan dari penyelenggaraan temu budaya di semua propinsi sejak tahun 1988. Ini berarti bahwa agenda Kongres ini telah membahas berbagai permasalahan yang sesungguhnya timbul dan dihayati oleh masyarakat kita. Kita semua memahami bahwa menyusun suatu agenda Kongres yang berskala nasional tidaklah mudah, lebih lagi kalau yang menjadi bahan bahasan berkaitan dengan gejala dan peristiwa budaya suatu masyarakat yang beraneka ragam budayanya.

Mengingat bahwa agenda Kongres Kebudayaan 1991 ini disusun atas dasar temuan yang merupakan kenyataan hidup dalam masyarakat, maka besar harapan saya Kongres ini berhasil menanggapi dengan pandangan dan pemikiran yang konstruktif, sehingga kita dapat mengembangkan kebudayaan nasional dengan berpijak pada kondisi aktual keberadaan masyarakat kita. Kita bukan saja harus selalu menyadari kebhinnekaan budaya sebagai ciri kebangsaan Indonesia, melainkan juga masih adanya kesenjangan tingkat perkembangan yang cukup luas rentangannya antara berbagai satuan masyarakat kita. Maka kalau kita ingin merumuskan sesuatu kebijakan yang berskala nasional – dan bukan hanya sekedar memuaskan sesuatu kalangan dalam masyarakat kita – semestinyalah kita mempertimbangkan kondisi menyeluruh yang merupakan kenyataan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

Saya percaya bahwa Kongres yang pesertanya terdiri dari berbagai unsur masyarakat dan datang dari berbagai penjuru nusantara Indonesia tidak melengahkan kenyataan tersebut. Kita semua menyadari bahwa kebudayaan terungkap melalui berbagai gejala dan peristiwa yang terus-menerus mengalami perkembangan. Apalagi dalam zaman yang ditandai oleh semakin banyaknya sarana dan saluran yang membuka kemungkinan bagi terjadinya hubungan antar bangsa dan antar budaya, maka kita harus arif dalam memilih upaya demi pengembangan kebudayaan nasional. Kiranya tidak perlu upaya tersebut berakibat kegoncangan oleh serta-merta pudarnya nilai-nilai budaya sehingga menimbulkan kerancuan bersikap dan berperilaku, tidak perlu pula berakibat ketegangan oleh terancamnya keutuhan peri kehidupan masyarakat kita.

Pengembangan kebudayaan – yang mengandung arti terjadinya perubahan – hendaknya dapat diwujudkan sebagai ikhtiar yang melibatkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya. Hal ini tentunya telah menjadi pertimbangan pula dalam persidangan Kongres ini.

Saya berharap agar Kongres ini tidak usai sekedar dengan dirumuskannya berbagai kesepakatan. Maka saya gembira mendengar, bahwa dalam Kongres ini dimajukan saran agar terbentuk wahana yang ditugasi untuk memantau dan menindaklanjuti hasilnya. Dengan demikian maka para peserta Kongres ini menunjukkan kesanggupan dan kesediaannya untuk dengan kemampuan

dan kesempatannya masing-masing berusaha agar apa yang telah dirumuskan sebagai kesepakatan Kongres Kebudayaan 1991 ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dengan demikian maka Kongres ini pun akan dapat berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkannya dengan kongres berikutnya, tanpa kita terlengah hingga terjadi jarak waktu yang terlalu lama antara keduanya.

Saya ingin menyatakan penghargaan kepada para peserta Kongres yang telah bekerja keras demi hasil yang maksimal, kendatipun waktunya amat terbatas. Berhari-hari Saudara-saudara berkumpul untuk bertukar pikiran dan bersilang pendapat, yang akhirnya bermuara pada kesepakatan yang kini menjadi hasil Kongres Kebudayaan 1991, kiranya jerih payah Saudara-saudara sekalian tiada sia-sia. Semoga segala upaya dengan itikad baik itu dihargai juga oleh masyarakat luas dan generasi yang akan datang.

Kepada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saya sampaikan apresiasi saya atas prakarsanya menyelenggarakan Kongres Kebudayaan 1991 ini, semoga banyak bahan yang dapat menjadi masukan berharga bagi perumusan kebijakan bagi upaya pengembangan kebudayaan nasional sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila serta memajukannya sebagaimana diamanatkan oleh pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945.

Kini, dengan mengucap syukur ke hadirat Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Kongres Kebudayaan tahun 1991 saya nyatakan usai dan saya nyatakan resmi ditutup.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang selalu memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUDHARMONO, S.H.



MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**S A M B U T A N**  
**MENTERI KOORDINATOR**  
**BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
**PADA KONGRES KEBUDAYAAN 1991 SIDANG PLENO I**  
**TANGGAL, 29 OKTOBER 1991**



MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA

**S A M B U T A N**  
**MENTERI KOORDINATOR**  
**BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
**PADA KONGRES KEBUDAYAAN 1991 SIDANG PLENO I**  
**TANGGAL, 29 OKTOBER 1991**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Saudara Pimpinan Sidang;

Saudara Peserta Kongres yang saya hormati,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala perlindungan yang dilimpahkan-Nya kepada bangsa dan negara kita. Atas berkah dan ridho-Nya pulalah maka pada hari ini kita dapat berkumpul bersama menyelenggarakan Kongres Kebudayaan ini.

Saudara sekalian,

Tuhan telah menciptakan Nusantara, dan Nusantara itu telah diserahkan-Nya kepada kita bangsa Indonesia. Maka menjadi tugas kita untuk menjaga, membangun dan mengembangkan Nusantara. Tugas tersebut adalah sebuah tugas kultural, karena bangsa kita tidak sekedar menjadi penghuni yang secara demografis memadati Nusantara, akan tetapi bangsa yang secara bertanggung jawab memiliki, menjaga serta membangun dan mengembangkannya, sehingga Nusantara tidak hanya menjadi sebuah konsep geografis, melainkan juga menjadi sebuah konsep dan kenyataan kultural secara semesta, menyeluruh dan terpadu.

Ditinjau dari perkembangan internasional maupun nasional, Kongres Kebudayaan yang ketiga ini sungguh terjadi di dalam saat/momentum yang

amat tepat. *Internasional*, karena Kongres ini diselenggarakan di dalam kurun gerakan Decade of Culture yang diprakarsai oleh UNESCO. Kongres ini merupakan suatu manifestasi partisipasi aktif bangsa Indonesia yang dengan gerakan tersebut ingin menyadarkan betapa sejarah manusia ini harus tumbuh dan berkembang sebagai usaha bersama membangun dan meningkatkan derajat kemanusiaan bangsa-bangsa. Manusia harus menjadi sumber referensi yang utama dan pertama. Dan inilah yang dinamakan gerakan Kebangkitan Kebudayaan. *Nasional*, Kongres Kebudayaan ketiga ini diselenggarakan pada momentum yang tepat pula, ialah pada penghujung akhir dari Pembangunan Jangka Panjang Ke I dan mengantar memasuki awal Pembangunan Nasional Jangka Panjang Ke II.

Berpegang kepada amanat Ketetapan MPR—RI Nomor II Tahun 1988 yang menegaskan, bahwa sasaran utama Pembangunan Jangka Panjang Ke II itu adalah pembangunan kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia, maka dapatlah dikatakan, bahwa pembangunan itu akan harus dilaksanakan dengan jalan pendekatan kultural. Hal tersebut memang telah menjadi konsep kita sejak awal pelaksanaan Pembangunan Nasional Jangka Panjang I yang lalu, dengan mempertegas wawasan pembangunan kita. Membangun manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, itulah hakekat pembangunan nasional kita. Di sini pun telah tersirat amanat kebudayaan di dalamnya. Karena itulah maka pembangunan kita pandang dan kita pahami sebagai pengamalan Pancasila, yang tidak lain adalah pandangan hidup dan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Tak seorangpun kiranya mengingkari, betapa meletakkan pembangunan di dalam kerangka aktualisasi eksistensi nasional yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu adalah meletakkan pembangunan di dalam kandungan wawasan kebudayaan secara mendasar dan fundamental.

Saudara-saudara sekalian,

Kebudayaan telah selalu menjadi bagian dari perjalanan sejarah perjuangan bangsa kita. Ini dapat kita rasakan apabila kita melihat kembali sejarah Indonesia modern yang diawali dengan terjadinya Kebangkitan Nasional pada awal abad ke XX ini.

Kebangkitan Nasional merupakan sebuah proses yang kompleks. Kolonialisme modern di samping telah membuat bangsa dan tanah air kita diperangkap di dalam belenggu dan eksploitasi, penjajahan telah pula membuat bangsa kita mengenal dunia besar di luarnya, terutama dunia Barat dengan alam pikiran dan gelombang modernisasi yang dibawanya. Hal ini membuka kemungkinan bangsa kita tidak hanya sekadar mengenal pendidikan modern akan tetapi juga mengalaminya. Situasi ini merupakan salah satu faktor yang lebih memacu kesadaran akan eksistensi dirinya dalam proses Kebangkitan Nasional itu. Kesadaran kebudayaan manunggal dengan gerakan Kebangkitan Nasional yang intinya adalah perjuangan mencapai Indonesia merdeka. Tercetuslah Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, yang secara singkat tetapi jelas dan tegas mengikrarkan satu Tanah Tumpah Darah/ Tanah Air Indonesia, satu bangsa Indonesia, dan satu bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda tidak hanya kita pandang sebagai peristiwa politik saja, akan tetapi juga suatu peristiwa kebudayaan.

Hubungan antara politik dan kebudayaan nampaknya menggerakkan pula refleksi mendasar mengenai perjuangan kemerdekaan dan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan mendapatkan dasar yang lebih mendalam pada wawasan kemanusiaan dan perjuangan kemerdekaan kita juga merupakan perjuangan derajat kemanusiaan. Ki Hadjar Dewantoro merupakan salah satu perintis dan pemimpin yang memadukan secara mendasar wawasan kemerdekaan, wawasan kebangsaan dan wawasan kemanusiaan di dalam konsep kebudayaannya. Dengan ini maka kebudayaan menjadi semakin manunggal dengan perjuangan kemerdekaan kebangsaan kita. Dan perjuangan inilah yang mengantarkan rakyat Indonesia sampai kepada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia, yang kemudian dilanjutkan dengan dibangunnya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta cita-cita nasional bangsa Indonesia yang dituangkan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi dasar negara kita.

Itulah sebabnya apabila kita baca secara seksama, Preambul UUD 1945 kita itu bukan saja sebuah piagam politik, tidak saja sebuah piagam ideologi, akan tetapi juga sebuah piagam kebudayaan. Di dalam Preambul itulah terdapat jawaban-jawaban mendasar terhadap pertanyaan-pertanyaan : masyarakat yang bagaimanakah yang kita cita-citakan, sistem negara yang bagaimanakah yang kita cita-citakan, kehidupan negara yang bagaimanakah yang kita

cita-citakan, sistem kebangsaan yang bagaimanakah yang kita cita-citakan, hubungan ekonomi yang bagaimanakah yang kita cita-citakan, dan juga kebudayaan yang macam apakah yang kita cita-citakan ? Itulah sebabnya maka sungguh mengherankan apabila saat ini masih terdengar adanya sementara orang yang merasa belum mempunyai pegangan yang jelas dan bertanya-tanya mengenai kebudayaan nasional macam apakah yang ingin kita bangun. *Kongres Kebudayaan ini saya harap akan dapat merampungkan permasalahan itu, dengan menunjuk bahwa Preambul UUD 1945 kita itulah sebenarnya jawabannya.*

Saudara-saudara sekalian,

Sumpah Pemuda sangat erat hubungannya dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32, yang berbunyi :

“Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa, usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa itu sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.”

Bagaimanakah hal-hal tersebut tadi dikaitkan dengan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang diprakarsai oleh UNESCO (organisasi PBB untuk Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan) yang mencanangkan terseleenggaranya suatu Dasawarsa Pembangunan se-Dunia untuk periode 1988 – 1997.

Apakah yang sebenarnya telah mendorong sejumlah 160 negara anggota UNESCO dan PBB yang meskipun berbeda-beda ideologi, tingkat perkembangan ekonomi dan sistem politiknya merasa perlu mengambil keputusan bersama untuk mencanangkan Dasawarsa tersebut.

Salah satu dorongan adalah tidak puasny mereka terhadap dampak setempat dan global daripada pertumbuhan ekonomi dan industri yang dialaminya terutama sejak tahun enampuluhan. Pada umumnya, ampir semua negara mencapai kemajuan-kemajuan di bidang ekonomi pada empatpuluh tahun belakangan ini. Ada yang kemajuannya berlangsung dengan cepat dan

nasional dan daerah yang diselenggarakan secara rutin, pemerintah juga menyelenggarakan program pembangunan bidang kebudayaan secara teratur dan berkesinambungan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Indonesia menduduki tempat pertama dalam hal frekuensi penyelenggaraan dan ragam kegiatan, termasuk antara lain, kegiatan kebudayaan dan peran pakar budaya daerah.

Dalam peningkatan aktivitas nasional, saya selaku Menko Kesra telah membentuk Kelompok Kerja baru pada tingkat nasional yang bertugas turut membantu prakarsa aktivitas budaya di tiap propinsi dalam keterkaitannya dengan pelaksanaan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan Se Dunia.

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai adalah : (1) Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan makna pentingnya pelestarian, pengembangan dan kesinambungan kebudayaan bangsa, (2) Meluasnya cakrawala wawasan kebudayaan sehingga dalam sikap dan pola tingkah laku manusia Indonesia mencerminkan kebudayaan Indonesia dan (3) Terciptanya suasana kerjasama budaya antar bangsa, melalui hubungan kerjasama yang dilandasi oleh saling memahami dan saling menghargai.

Perwujudan dari sasaran itu satu di antaranya adalah melalui program kegiatan seperti Kongres Kebudayaan ini. Salah satu bentuk kegiatan Dasawarsa Kebudayaan, menyebut sasaran "meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembinaan kebudayaan". Oleh karena itu, Kongres Kebudayaan sebagai arena bagi peserta untuk bertukar pandangan tentang pembinaan dan pengembangan kebudayaan, hendaknya benar-benar kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tugas kongres ini ialah agar mampu membawa semua pemikiran yang berkembang ke dalam suatu wawasan Nusantara.

Sebagai salah satu dari tindak lanjut Kelompok Kerja Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan akan menyelenggarakan rapat kerja koordinasi Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan sebelum akhir tahun 1991 yang akan dihadiri oleh unsur-unsur pemerintah, dan instansi terkait dari Daerah maupun Pusat dalam rangka upaya Pengembangan Kebudayaan Nasional.

Mengakhiri sambutan ini bagi saya pribadi Kongres Kebudayaan 1991 membawakan makna yang sangat khas. Kalau dalam masa kanak-kanak saya, lebih dari enampuluh tahun lalu, saya dibesarkan dalam sosial budaya yang cukup tenang dan tidak mengalami perubahan-perubahan besar, di mana hubungan kekeluargaan diatur oleh nilai-nilai perilaku yang telah teruji dalam

tradisi budaya di mana manusia dan alam merupakan satu kesatuan, pada hari tua saya sekarang ini saya melihat umat manusia makin tidak mampu berhadapan dengan melandanya perobahan-perobahan raksasa sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dampak dari pada teknologi komputer, teknologi transportasi dan telekomunikasi pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Manusia sebagai makhluk biologis, sosial, spiritual dan intelektual haruslah mengembangkan segala potensi yang dapat bertahan terhadap perobahan dramatis dan dahsyat dunia kita hasil kreativitas manusia sendiri dari bentuk lama ke bentuk baru.

Makna, dan saya berharap hikmah Kongres Kebudayaan 1991 adalah kesepakatan kita bersama, bahwa pengembangan kebudayaan dan jatidiri budaya merupakan jaminan bagi munculnya manusia Indonesia terhadap arus dan ombak perobahan masa kini, tetapi sekaligus mampu bertindak sebagai makhluk budaya yang berketahanan tinggi.

Usaha keseluruhan ditujukan untuk menjadikan bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang besar dan negara yang kuat. Besar dalam arti kualitatif kultural, kuat dalam demokratik struktural.

Melalui Kongres Kebudayaan 1991 ini hendaknya kita bersama-sama tingkatkan ketahanan budaya manusia Indonesia yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa potensi mencipta ilmu pengetahuan dan teknologi serta gejala wujud keindahan di bumi kita ini.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**SOEPARDJO ROESTAM**

nasional dan daerah yang diselenggarakan secara rutin, pemerintah juga menyelenggarakan program pembangunan bidang kebudayaan secara teratur dan berkesinambungan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan Indonesia menduduki tempat pertama dalam hal frekuensi penyelenggaraan dan ragam kegiatan, termasuk antara lain, kegiatan kebudayaan dan peran pakar budaya daerah.

Dalam peningkatan aktivitas nasional, saya selaku Menko Kesra telah membentuk Kelompok Kerja baru pada tingkat nasional yang bertugas turut membantu prakarsa aktivitas budaya di tiap propinsi dalam keterkaitannya dengan pelaksanaan Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan Se Dunia.

Sasaran yang diharapkan dapat dicapai adalah : (1) Tumbuhnya kesadaran masyarakat akan makna pentingnya pelestarian, pengembangan dan kesinambungan kebudayaan bangsa, (2) Meluasnya cakrawala wawasan kebudayaan sehingga dalam sikap dan pola tingkah laku manusia Indonesia mencerminkan kebudayaan Indonesia dan (3) Terciptanya suasana kerjasama budaya antar bangsa, melalui hubungan kerjasama yang dilandasi oleh saling memahami dan saling menghargai.

Perwujudan dari sasaran itu satu di antaranya adalah melalui program kegiatan seperti Kongres Kebudayaan ini. Salah satu bentuk kegiatan Dasawarsa Kebudayaan, menyebut sasaran "meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembinaan kebudayaan". Oleh karena itu, Kongres Kebudayaan sebagai arena bagi peserta untuk bertukar pandangan tentang pembinaan dan pengembangan kebudayaan, hendaknya benar-benar kita manfaatkan sebaik-baiknya. Tugas kongres ini ialah agar mampu membawa semua pemikiran yang berkembang ke dalam suatu wawasan Nusantara.

Sebagai salah satu dari tindak lanjut Kelompok Kerja Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan akan menyelenggarakan rapat kerja koordinasi Dasawarsa Pengembangan Kebudayaan sebelum akhir tahun 1991 yang akan dihadiri oleh unsur-unsur pemerintah, dan instansi terkait dari Daerah maupun Pusat dalam rangka upaya Pengembangan Kebudayaan Nasional.

Mengakhiri sambutan ini bagi saya pribadi Kongres Kebudayaan 1991 membawakan makna yang sangat khas. Kalau dalam masa kanak-kanak saya, lebih dari enampuluh tahun lalu, saya dibesarkan dalam sosial budaya yang cukup tenang dan tidak mengalami perubahan-perubahan besar, di mana hubungan kekeluargaan diatur oleh nilai-nilai perilaku yang telah teruji dalam

tradisi budaya di mana manusia dan alam merupakan satu kesatuan, pada hari tua saya sekarang ini saya melihat umat manusia makin tidak mampu berhadapan dengan melandanya perubahan-perubahan raksasa sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dampak dari pada teknologi komputer, teknologi transportasi dan telekomunikasi pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat. Manusia sebagai makhluk biologis, sosial, spiritual dan intelektual haruslah mengembangkan segala potensi yang dapat bertahan terhadap perubahan dramatis dan dahsyat dunia kita hasil kreativitas manusia sendiri dari bentuk lama ke bentuk baru.

Makna, dan saya berharap hikmah Kongres Kebudayaan 1991 adalah kesepakatan kita bersama, bahwa pengembangan kebudayaan dan jatidiri budaya merupakan jaminan bagi munculnya manusia Indonesia terhadap arus dan ombak perubahan masa kini, tetapi sekaligus mampu bertindak sebagai makhluk budaya yang berketahanan tinggi.

Usaha keseluruhan ditujukan untuk menjadikan bangsa dan negara kita menjadi bangsa yang besar dan negara yang kuat. Besar dalam arti kualitatif kultural, kuat dalam demokratis struktural.

Melalui Kongres Kebudayaan 1991 ini hendaknya kita bersama-sama tingkatkan ketahanan budaya manusia Indonesia yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa potensi mencipta ilmu pengetahuan dan teknologi serta gejala wujud keindahan di bumi kita ini.

Terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

**SOEPARDJO ROESTAM**



MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PADA ACARA PEMBUKAAN KONGRES KEBUDAYAAN 1991  
JAKARTA, 29 OKTOBER 1991



MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PADA ACARA PEMBUKAAN KONGRES KEBUDAYAAN 1991  
JAKARTA, 29 OKTOBER 1991**

umumnya, maka berbagai perubahan yang melibat kita di masa kini dan masa depan niscaya tidak akan merapuhkan penghayatan jati diri kita yang khas sebagai bangsa.

Tema Kongres tahun 1991 ini ialah: "Kebudayaan Kita: Kemarin, Kini dan Esok" yang dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai judul permasalahan. Sejumlah 88 makalah akan disajikan dalam persidangan, dan sejumlah 38 sumbangan makalah dibagikan sebagai masukan tambahan, sehingga pembahasan dalam persidangan Kongres terutama beranjak dari bahan tertulis. Minat untuk menjadi peserta dalam Kongres ini melampaui kemampuan dukungan dana dan sarana yang tersedia, sehingga Panitia Kongres terpaksa menetapkan batas maksimal bagi jumlah peserta maupun makalah yang disajikan. Hal lain yang diperhitungkan demi menjaga tertibnya persidangan ialah kendala waktu; dalam rentang waktu yang tersedia tidak mungkin segala gejala dan peristiwa budaya dapat dibahas. Dalam hubungan ini perlu diingatkan, bahwa khusus mengenai bahasa Indonesia yang merupakan pengejawantahan budaya amat penting – telah diselenggarakan beberapa Kongres tersendiri, terakhir ialah Kongres Bahasa Indonesia ke-V yang dibuka oleh Bapak Presiden tanggal 28 Oktober 1988. Oleh karena itu maka dalam Kongres ini perhatian tidak lagi diberikan perhatian khusus sebagaimana diberikan pada gejala dan peristiwa budaya lainnya yang belum cukup tergarap pada skala nasional.

Kami menyampaikan terima kasih banyak dan penghargaan tinggi kepada Ibu Tien Soeharto yang telah mendukung pelaksanaan Kongres ini dengan mengizinkan penggunaan berbagai fasilitas Taman Mini Indonesia Indah untuk mempermudah penyelenggaraan Kongres.

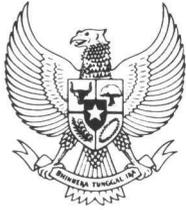
Kami juga merasa bangga dan berbesar hati atas kehormatan yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada Kongres Kebudayaan 1991 ini dengan kesediaan beliau untuk menyampaikan amanat beliau dan meresmikan pembukaannya.

Akhirnya kami mohon dukungan masyarakat seluasnya demi keberhasilan Kongres ini membuahkan pemikiran dan perumusan yang konstruktif bagi ikhtiar memajukan kebudayaan nasional Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh pasal 32 UUD 1945.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang senantiasa mem-  
impahkan rahmatNya kepada kita.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Fuad Hassan



MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PADA ACARA PENUTUPAN KONGRES KEBUDAYAAN 1991  
JAKARTA, 02 NOVEMBER 1991



MENTERI  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

## LAPORAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA ACARA PENUTUPAN KONGRES KEBUDAYAAN 1991 JAKARTA, 02 NOVEMBER 1991

Setelah sehari-hari membahas berbagai permasalahan gejala dan peristiwa budaya yang menjelma di tanahair dewasa ini, Kongres yang berlangsung sejak tanggal 29 Oktober yang baru lalu kini sampai pada saat akan usainya. Kita semua maklum, bahwa merumuskan kesepakatan bukanlah tugas yang mudah; apalagi kalau yang hendak digalang adalah pandangan dan pendapat perihal kebudayaan yang begitu luas rentang arti dan lingkupnya. Lebih dari tergantung pada luasnya pengetahuan dan dalamnya pemahaman, penggalangan kesepakatan yang dapat dihasilkan melalui forum sebesar ini terutama ditentukan oleh kesungguhan dan itikad baik dari para peserta Kongres ini; maka dalam semangat itu pula Kongres Kebudayaan 1991 ini telah membuahkan hasilnya berupa sejumlah perumusan kesepakatan.

Kongres ini berlangsung dalam suasana bebas-hambatan bagi segenap peserta untuk mengutarakan pendapatnya, baik yang melalui bahan tulisan maupun yang diutarakan secara lisan. Maka tersanggahlah kabar-tak-bersumber yang berpraduga tentang dilakukannya sensor terhadap makalah yang disajikan dan yang dibagikan. Demikian juga tidak benar adanya pemakalah yang dibatalkan penyajiannya; yang benar ialah batalnya penyajian karena makalahnya tidak dimasukkan sampai jauh melampaui batas waktu yang ditetapkan, kemudian masih diperlonggar lagi dengan pengunduran batas waktu, dan bahkan sampai Kongres ini dimulai.

Sejak semula disiarkan bahwa Kongres ini terbuka untuk partisipasi siapa saja yang ingin mendaftarkan diri sebagai pesertanya. Samasekali tidak

ada kriteria untuk melakukan seleksi terhadap mereka yang berminat ikut serta dalam Kongres. Maka tidak benar berita adanya orang yang ditolak hadir dan ikutserta dalam Kongres ini atas alasan terkena "cekal" seperti kesan yang ditimbulkan melalui kabar yang samar; walaupun ada orang yang dikenal atau memperkenalkan dirinya sebagai penyandang cap "cekal", Kongres ini tidak tertutup baginya.

Prasangka bahwa Kongres ini adalah usaha rekayasa birokrasi sehingga arah dan tujuannya sudah dapat diduga sebelumnya juga telah tersanggah oleh kenyataannya bahwa arus pikiran yang mengalir serta silang-pendapat yang terjadi dalam persidangan Kongres ini berlangsung spontan dan leluasa, tanpa diselimuti suasana ketidakpastian atau kecemasan.

Semoga kita makin mampu membebaskan diri dari keterpasungan dalam bingkai-bingkai prasangka dan praduga yang bisa memperpicik wawasan kita tentang suatu fenomena sebagaimana nyatanya.

Patut dihargai antusiasme para peserta Kongres yang dengan sungguh-sungguh melibatkan diri dalam berbagai diskusi. Rendahnya angka absensi kiranya dapat menjadi indikasi betapa tingginya minat para peserta untuk meliputi sebanyak mungkin bahan yang dibahas; hal ini antara lain kentara dari mobilitas peserta yang sering beralih dari suatu sidang komisi ke lainnya.

Kepada para pemakalah patut kita sampaikan penghargaan juga, karena dengan masuknya sebagian besar makalah pada waktunya maka tugas panitia untuk mempersiapkan Kongres ini diperlancar; perlu dicatat, bahwa pada saat Kongres dibuka makalah yang sudah siap berjumlah 112, dan yang menyusul kemudian 14 makalah. Maka dari keseluruhan jumlah 135 makalah yang diharapkan hanya 9 makalah yang tidak masuk. Mengingat pengalaman selama ini, maka makalah yang masuk — disajikan atau dibagikan — berjumlah optimal.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selaku pemrakarsa penyelenggaraan Kongres ini menyampaikan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada segenap peserta yang telah berjerih-payah sehingga Kongres ini menjadi forum yang bermanfaat guna menghimpun berbagai pikiran dan pendapat berkenaan dengan usaha untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional dalam arti seluasnya. Dari sejumlah kesepakatan yang dirumuskan sebagai hasil Kongres Kebudayaan 1991 pasti banyak butir yang berharga sebagai bahan pertimbangan bagi disusunnya strategi dan kebijakan pengembangan kebudayaan nasional.

Terimakasih setulusnya kepada segenap anggota panitia Kongres yang telah mengerahkan segala daya-upaya demi kelancaran urusan yang menyangkut penyelenggaraan Kongres ini.

Demikianlah beberapa catatan yang perlu disampaikan sebelum Kongres ini kita akhiri.

Terimakasih kepada Bapak Wakil Presiden atas kehadiran beliau pada upacara penutupan Kongres Kebudayaan 1991 serta kesediaan beliau untuk menyatakan usainya Kongres ini dan meresmikan penutupannya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fuad Hassan', written in a cursive style.

Fuad Hassan

HASIL RUMUSAN SIDANG KELOMPOK

## HASIL RUMUSAN SIDANG KELOMPOK

### KELOMPOK I

1. Terdapat kerisauan umum peserta oleh degradasi dan dekadensi nilai-nilai dan warisan budaya tradisional, antara lain oleh karena:
  - a. Menguatnya sentralisme ekonomi akibat pola birokrasi telah menyebabkan ketidak-seimbangan kehidupan budaya antara satu daerah dengan daerah lainnya.
  - b. Intervensi kebudayaan luar melalui komunikasi dan informasi yang diserap oleh pola hidup kota metropolitan sangat mempengaruhi pola dan perilaku budaya bangsa ke arah pendangkalan kreativitas dan aktivitas masyarakat.
  - c. Ketidak-seimbangan kegiatan studi pengkajian dan publikasi tentang kebudayaan daerah menimbulkan jurang yang kian melebar dalam hal makna kesatuan dan persatuan bangsa.
2. Untuk upaya penangkalannya diusulkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Diperlukan perubahan pada pola dan sistem sentralisme birokrasi atau pemusatan kekayaan ke satu daerah beralih kepada pemerataan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.
  - b. Perlu segera didirikan atau diprakarsai oleh pemerintah untuk mendirikan pusat dokumentasi dan informasi kebudayaan lokal di setiap propinsi.
  - c. Perlu perhatian yang sama dalam hal pembinaan dan pengembangan antara olahraga dan seni budaya, baik oleh pemerintah ataupun masyarakat.
  - d. Perlu disediakan saksi kepada para penulis buku tentang budaya tradisional dari setiap etnik di Indonesia.
  - e. Perlu perhatian dan tindakan yang lebih serius dalam mencegah perpindahan/pengrusakan benda purbakala yang menjadi warisan budaya.

Kelompok I : 1. Ketua : A.A. Navis  
2. Wakil Ketua : Dr. Nico L. Kana  
3. Sekretaris : Ny. Koen Mulyono

Jakarta, 2 Nopember 1991

## KELOMPOK II

1. Perlu penggalian kembali nilai-nilai budaya transformatif yang sangat diperlukan dalam usaha memberi landasan budaya bagi pembangunan dan kebudayaan nasional.
2. Konstatasi: budaya kita kini mempunyai cacat:
  - a. Daya hidup memudar, karena sikap-sikap otoriter instruktif, doktriner, dalam masyarakat.
  - b. Mutu hidup merosot (kemauan kerja keras, idealisme, spontanitas sudah hilang) karena kurangnya demokrasi.
3. Agar diputuskan: Kebudayaan Nasional = Kebudayaan Pancasila.
4. Rumuskan segala hal mengenai Kebudayaan dengan bentuk lembaga budaya nasional, yang bertugas merumuskan watak bangsa, kesenian, busana dan makanan sebagai refleksi budaya nasional agar sumber inspirasi: Revolusi 45, UUD 45, Pancasila, Sejarah dan budaya daerah.
5. Kesepakatan: Negara Pancasila dan seterusnya, tetapi yang penting bagaimana rumusannya.
6. Pembangunan sebagai suatu proses kebudayaan harus tumbuhkan kemandirian komunitas dengan memberikan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya lembaga swadaya masyarakat. Hendaknya diubah sikap birokrasi yang cenderung patronizing, dan mulai tekankan prinsip desentralisasi.
7. Perlu tingkatkan perhatian terhadap penyelenggaraan pendidikan, dengan catatan:
  - a. Pelaksanaan pendidikan kita dewasa ini sangat diwarnai dimensi kultural yang negatif/misalnya dengan adanya sistem pintu belakang, sogok, otoriter, sikap terlalu subyektif dan personal dan lain-lain.
  - b. Pendidikan kita kini terlalu menekankan pada aspek kognitif saja, sedang aspek aktif itu justru lebih penting.
8. Juga perlu ditingkatkan minat baca bangsa termasuk baca sastra.
9. Walaupun Kongres Bahasa telah diadakan tersendiri, Kongres perlu lebih menaruh perhatian terhadap masalah bahasa, sebagai salah satu unsur kebudayaan.

10. Perhatian juga harus diberikan pada media massa/pers dan dampak negatif dari T.V., Video dan seterusnya.
11. Adanya penolakan terhadap segala yang bersifat "*semu*" (keterbukaan semu, demokrasi semu dan sebagainya).
12. Titipan tanggapan tertulis.

Kelompok II :

1. Ketua : H. Susanto Wiryoprasonto
2. Wakil Ketua : Dr. Muchtar Naim
3. Sekretaris : Dr. Riris K. Toha Serumpait

Jakarta, 2 Nopember 1991

### KELOMPOK III

1. Daya cipta sangat diperlukan dalam pertumbuhan kebudayaan. Untuk ini diperlukan berbagai info dan supos struktur serta dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun masyarakat lebih-lebih lagi oleh insan budayawan sendiri.
2. Ciri khas negara dan bangsa Indonesia adalah ke-Bhinnekaan budaya. Setiap daerah mempunyai nilai-nilai budaya serta bentuk kebudayaannya sendiri yang sudah berkembang dan membentuk warna lokal yang menjadi warna nasional.
3. Hasil kreativitas budayawan dalam berbagai ragam seni, baik film, lukis, tari, sastra, kria dan lain-lain, diharapkan tidak mengarah kepada tujuan komersial semata, tetapi lebih mengacu pada kreativitas yang mempunyai ekspresi nilai budaya yang tinggi.
4. Budayawan menempati posisi strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu para budayawan harus memiliki kebebasan kreativitas yang bertanggung jawab kepada masyarakat yang sesuai dengan Ideologi Pancasila.
5. Antisipasi terhadap arus globalisasi dengan ciri teknologi informasi canggih yang juga mempunyai dampak negatif yang dapat mempengaruhi daya cipta dan perkembangan kebudayaan nasional, harus dilakukan secara bersama dalam berbagai kreativitas yang berpijak pada watak ke-Indonesiaan serta meningkatkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menjadi insan Indonesia moderen yang tetap berpijak pada ke-Indonesiaan.
6. Apresiasi seni sendiri mungkin harus ditumbuhkan bagi masyarakat melalui pendidikan formal dan informal.
7. Bahasa Indonesia harus diarahkan kepada pembentukan kebudayaan nasional, dengan catatan pengambilan istilah-istilah asing harus selektif dan hanya pada hal-hal yang bersifat kognitif, sedangkan yang bersifat ekspresif dan evolusif cukup dari akar Indonesia.
8. Kongres Kebudayaan 1991 haruslah dapat melahirkan satu lembaga independen yang akan menjadi penampung aspirasi kebudayaan nasional.

Untuk itu perlu membentuk semacam Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional atau lainnya.

- Kelompok III :
1. Ketua : Dra. Titi Said
  2. Wakil Ketua : Shofwan Karim, MA
  3. Sekretaris : Drs. Rusdi Saleh

Jakarta, 2 Nopember 1991

## **KELOMPOK IV**

### **I. Kebudayaan dan Ekonomi**

1. Ekonomi adalah salah satu aspek kebudayaan yang bertujuan meningkatkan martabat manusia, khususnya dari sudut kehidupan material. Sungguhpun demikian, upaya-upaya yang dijalankan oleh manusia itu seringkali menimbulkan dampak yang berkecenderungan merosotkan martabat manusia. Oleh karena itu dalam upaya pembangunan ekonomi ini, nilai-nilai kebudayaan sebagaimana tersimpul dalam Pancasila penting sekali untuk selalu diingat dan dijadikan dasar serta orientasi pembangunan.
2. Dalam praktek kehidupan ekonomi seringkali timbul distorsi nilai yang menyebabkan disorientasi terhadap cita-cita budaya. Hal ini disebabkan karena struktur masyarakat dan struktur politik tidak mendukung. Oleh karena itu berbagai upaya untuk memperbaiki struktur masyarakat dan politik perlu dilakukan guna mengembangkan nilai-nilai budaya dalam kehidupan ekonomi.
3. Kebudayaan sebagai aspek simbolis dan idealisme memegang peranan penting dalam merubah dan membentuk kondisi kehidupan ekonomi, terutama dalam memperkuat kemampuan manusia untuk menentukan nasibnya sendiri dan mengarahkan jalannya sejarah. Oleh karena itu pengikatan ekonomi dalam matra budaya perlu dikembangkan secara kreatif dengan melakukan interpretasi kembali idiom-idiom budaya sejalan dengan perubahan masyarakat.
4. Pembangunan ekonomi dan hukum dapat secara real menjadi sarana peningkatan kehidupan warga bangsa baik perorangan maupun masyarakat.
5. Pembangunan ekonomi hendaknya senantiasa memperhatikan kepentingan rakyat banyak yang memang merupakan bagian terbesar warga bangsa.

## II. Kebudayaan dan Iptek

1. Hakikat iptek tidak dapat dilepaskan dari latar belakang kelahirannya, yaitu Renaissance dan Aufklarung. Dari kelahiran dan perkembangannya itu, ilmu pengetahuan tampil dalam tiga dimensi: sebagai masyarakat, sebagai proses dan sebagai produk. Tetapi di balik itu semua "bersemayam" budaya tertentu, yaitu budaya Renaissance.
2. Dalam puncak perkembangannya, iptek sudah bukan sekedar sarana, melainkan sudah menjadi suatu yang *substantif* bagi kehidupan umat manusia masa kini, dan dengan kekuatannya itu iptek telah menyentuh semua segi dan sendi kehidupan secara *ekstensif*, dan pada gilirannya merubah budaya manusia secara *intensif*.
3. Kebudayaan adalah seluruh karya dan aktivitas serta kralisasi upaya manusia untuk menjawab tantangan hidupnya; dan kesemuanya itu kemudian diolah dan ditafsirkan kembali untuk diperoleh maknanya melalui proses dialektis yang tidak mengenal titik henti. Karena itu kebudayaan mengandung sifat-sifat: sesuatu yang dinamis, learning process dan sekaligus strategi. Dinamika tersebut meningkat dengan adanya pengaruh iptek, di tengah situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang sedang bertransisi dari masyarakat pertanian tradisional menuju masyarakat industri modern.
4. Dalam pada itu, masyarakat Barat telah berkembang melalui tiga macam revolusi: pertanian, industri dan cybernetica kini telah berada dalam era menuju "pasca industri". Untuk "mengimbangnya" Indonesia dalam masa transisi dari masyarakat pertanian tradisional ke masyarakat industri modern, sekaligus secara simultan harus menerapkan iptek canggih, adaptif, dan protektif.
5. Relevan dan konsisten dengan amanat GBHN 1988: "pembangunan nasional adalah pembangunan yang berbudaya; pembangunan nasional adalah sebagai pengamalan Pancasila", diperlukan adanya penegasan pengembangan iptek yang pada hakikatnya adalah suatu strategi pengembangan budaya yang memperhatikan dimensi teleologis, etis dan integratif.

### III. Pendidikan di Bidang Kebudayaan

1. Pendidikan budaya yang terkait dengan terwujudnya sikap dan perilaku budaya anak didik dalam sektor ekonomi, sosial, politik dan hukum sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa perlu diwujudkan implementasinya dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan materinya dimasukkan dalam kurikulum dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Di samping itu, pendidikan Ilmu Budaya Dasar di perguruan tinggi perlu disempurnakan.
2. Untuk mewujudkan pemerataan, kesejahteraan dan keadilan sosial sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 perlu diperhatikan kesenjangan-kesenjangan yang ada bukan saja antara kaya dan miskin, desa dan kota, tetapi juga memberikan perhatian kepada masyarakat terasing, terpencil dan sulit terutama di wilayah perbatasan seperti daerah Riau. Dalam hal ini, pendekatan budaya perlu dijadikan dasarnya.
3. Keseimbangan pembangunan antar daerah perlu diperhatikan. Untuk itu dalam program pembangunan budaya perlu diperhatikan urunan daerah tertentu kepada budaya nasional seperti sumbangan dalam bahasa, religi, ekonomi, politik dan sebagainya, dan karena itu pusat-pusat kajian budaya menurut unsur-unsur budaya yang ada perlu ditumbuhkembangkan seperti pusat kajian budaya nasional di daerah-daerah atau LIPI perlu memiliki cabang (perwakilan di daerah). Perguruan tinggi di daerah perlu diberi kesempatan dengan biaya yang tersedia dari APBN atau donor dari luar negeri dan sebagainya.
4. Dalam rangka memberikan peluang bagi putera-puteri Indonesia yang akan berkarya dengan nilai-nilai kebudayaan nasional yang tinggi, maka pemerintah perlu memberikan penghargaan kebudayaan kepada mereka.

### IV. Kebudayaan dan Wanita

1. Harus dikembangkan kesempatan yang seluas-luasnya bagi kaum wanita untuk memasuki dan berperan dalam segala bidang yang sesuai dengan martabat kemanusiaan dan proses pemanusiaan.
2. Perlu dikembangkan kemitraan wanita dan pria yang serasi dan men-

dudukkan masing-masing pada statusnya tanpa merendahkan martabat kemanusiaan. Wanita perlu diterima secara ikhlas keikutsertaannya dalam perencanaan, perumusan dan pengelolaan pembangunan. Kecuali itu perlu dihilangkannya sikap-sikap tradisional yang memandang wanita hanya berperan dalam rumah tangga sedangkan pencari nafkah utama adalah pria, sebab penghasilan wanita itupun akhirnya dimanfaatkan untuk seluruh keluarga. Dengan menghilangkan kendala-kendala itu, maka wanita Indonesia akan dapat diarahkan untuk kepentingan masyarakat industri yang manusiawi.

3. Peran ganda wanita yang dikesankan lebih berat karena proses pembangunan ekonomi yang belum mampu menyentuh masyarakat lapisan bawah, maka untuk menghilangkan beban berat wanita, terutama di pedesaan diperlukan perencanaan pembangunan yang mampu mengubah ekonomi tradisional ke pertanian yang lebih maju.
4. Perlu dihindarkan terjadinya gap yang semakin jauh antara golongan wanita di masyarakat menengah/atas dengan wanita di golongan masyarakat bawah/desa.
5. Peranan wanita di bidang ekonomi tradisional seperti sebagai tenaga pencuci maupun pekerjaan-pekerjaan tangan lainnya perlu diinventarisir dan dimasukkan ke dalam sensus/statistik tentang tenaga kerja wanita agar penyusunan rencana pembangunan dapat lebih sehat.

## V. Kebudayaan dan Persatuan—Kesatuan Bangsa

1. Pancasila harus kita aktualisasikan secara konsekuen dan konsisten sebagai paradigma dalam penyusunan strategi kebudayaan menyongsong masa depan. Pancasila yang dimaksud adalah yang termuat di dalam Pembukaan UUD 1945, sebab itulah yang merupakan dokumen yang resmi dan lengkap dari bangsa Indonesia dalam membudaya. Pancasila yang terdapat di dalam Pembukaan UUD 1945 itu merupakan filter dan dasar pengembangan kebudayaan daerah maupun kebudayaan asing yang masuk ke Indonesia untuk mengalami proses akulturasi. Tugas ini dilakukan oleh MPR dalam wujud GBHN yang merupakan pemberi arah kepada bangsa Indo-

nesia dalam membudaya secara luas, yaitu antisipatif dan memuat pula kemampuan korektif karena setiap lima tahun sekali diadakan sidang. Hasil sidang MPR itupun merupakan keputusan seluruh rakyat Indonesia karena MPR dianggap sebagai penjelmaan segenap rakyat Indonesia.

2. Budaya daerah beserta unsur-unsur pendukungnya ditumbuhkembangkan untuk memperkaya budaya nasional yang Bhinneka Tunggal Ika. Dalam rangka ini perlu segera dilakukan inventarisasi dan dokumentasi kesamaan-kesamaan unsur budaya etnis di Nusantara untuk dikomunikasikan.
3. Menghadapi arus globalisasi yang melanda seluruh dunia diperlukan suatu perangkat budaya yang mampu menjadi dasar dan arah, sekaligus pendorong bagi masyarakat Indonesia yang maju dan modern. Budaya Indonesia yang menghargai keselarasan, keserasian dan keseimbangan tetapi tidak dinamis, dipandang dari segi globalisasi kita akan tertinggal terus. Karena itu masalah kita adalah sampai di mana keselarasan, keserasian dan keseimbangan tersebut dipertahankan tetapi dengan tidak menghambat kemajuan. Sudah waktunya ditanamkan budaya Indonesia yang keras, antisipatif dan dinamis serta komited terhadap kemajuan bangsa.
4. Dunia pendidikan perlu dipacu untuk secara terarah melahirkan manusia-manusia budaya yang sadar, terdidik dan berkualitas. Untuk itu dunia pendidikan harus menjadikan diri sebagai masyarakat padat ilmu atau masyarakat ilmiah.
5. Para pemimpin, terutama yang mengabdikan diri di bidang pemerintahan agar memprakarsai langkah-langkah operasional yang nyata dan mencurahkan segenap tenaga dan pikirannya untuk mengakhiri sikap dan perilaku yang meremehkan bahasa Indonesia serta menempatkannya pada posisi yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UUD 1945.
6. Di dalam pembangunan Indonesia pada umumnya dan planologi kota agar diperhatikan unsur-unsur budaya setempat disertai dengan kesadaran akan pentingnya lingkungan alam sehingga dapat menimbulkan keserasian sehingga dapat dihindarkan segala eksesnya, terutama tumbuhnya urban yang mencekam.

## VI. Kebudayaan dan Hukum

1. Pengembangan hukum supaya lebih mendapatkan perhatian. Benar bahwa konsepsi hukum memang tidak sama dengan keadilan, tetapi aspek keadilan sangat penting di dalam hukum.
2. Pengembangan hukum ini perlu memperoleh perhatian secara serius. Dan ini sangat tergantung kepada para pelaku dan penegak hukum.
3. Untuk mencapai keadilan yang sebenar-benarnya diperlukan keberanian dari para penegak hukum dalam memberikan tafsir budaya terhadap hukum dan peraturan perundangan yang ada.

## VII. Kebudayaan dan Pertahanan Keamanan

1. Perlawanan bersenjata maupun tidak bersenjata terhadap kekuatan asing yang berlangsung sejak akhir abad-16, membuktikan semangat bangsa-bangsa di Nusantara ini mempertahankan kelangsungan nilai-nilai dasar kebudayaan masyarakat, kendati di bawah tekanan-tekanan dan paksaan penguasaan kolonial Belanda disusul penguasaan tentara pendudukan Jepang. Meskipun belum bersifat dan ber ruang lingkup nasional, namun perlawanan-perlawanan itu pada hakikatnya mempunyai arti dan fungsi:
  - (1) mempertahankan kedaulatan, eksistensi dan martabat bangsa Indonesia;
  - (2) melanjutkan kelangsungan lembaga-lembaga kebudayaan masyarakat Indonesia sebagai bentuk-bentuk khas dari kehidupannya;
  - (3) menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan pada umumnya, suasana hidup merdeka pada khususnya.
2. Meskipun peperangan itu adalah salah satu bentuk dan ekspresi kebudayaan manusia, namun bagi bangsa yang berbudaya, termasuk Indonesia, perang merupakan *cara yang terakhir* dan *terpaksa* dilakukan demi mempertahankan kedaulatan, kemerdekaan dan nilai-nilai bangsa terhadap agresi dari luar.
3. Sebagai negara berkembang yang sedang mengalami transformasi budaya dari masyarakat agraris—tradisional menuju masyarakat industri modern, Indonesia mempunyai banyak kerawanan di segala

bidang kehidupan. Dengan demikian masalah keamanan nasional lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika pembangunan bangsa, baik dinamika internal sendiri maupun pengaruh dinamika eksternal/global yang melanda semua bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Oleh karena itu upaya memelihara keamanan nasional, khususnya stabilitas dalam negeri sebagai landasan kokoh bagi kesinambungan pembangunan nasional, sangat ditentukan oleh kebijakan dan sistem sosial-politik-ekonomi yang harus melibatkan rakyat banyak, dijiwai dan mengacu ke budaya Pancasila. Penggunaan kekuatan fisik/militer dalam menangani masalah keamanan nasional sedemikian itu harus dihindari sejauh mungkin.

4. Sistem Pertahanan Keamanan yang dapat melibatkan peran serta dan tanggung jawab rakyat banyak itu ialah sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Sedangkan penyelenggaraannya harus berada dalam kerangka doktrin Ketahanan Nasional yang pada dasarnya berarti, bahwa *keamanan nasional dalam arti yang seluas-luasnya* hanya terdapat dalam masyarakat yang *sejahtera* lahiriah dan batiniah, dan bahwa *kesejahteraan nasional dalam arti yang seluas-luasnya* hanya mungkin apabila rakyat merasa *aman* lahiriah dan batiniah.
5. Masalah pertahanan – keamanan, apabila perang, tidak boleh diputuskan hanya oleh segelintir manusia saja yang sedang berkuasa. Pengambilan keputusan yang demokratis adalah sangat krusial bagi nasib umat manusia umumnya, bangsa Indonesia khususnya.

## VIII. Kesan Umum

Di dalam kelompok IV ini telah dibicarakan hal-hal yang berkenaan dengan perlunya peningkatan demokratisasi dan keterbukaan. Kecuali itu dikemukakan pula ketidak-setujuannya terhadap korupsi, apalagi bila masalah ini telah dianggap sebagai budaya bangsa. Dikemukakan pula ketidaksetujuan terhadap monopoli yang merugikan kepentingan rakyat. Kebudayaan yang harus diperhatikan, dibangun dan dikembangkan adalah yang berbudi luhur.

- Kelompok IV:**
1. Ketua : Dr. Harry Tjan Silalahi, SH.
  2. Wakil Ketua : Dr. Fachrurrozie Syarkawi
  3. Sekretaris : Dra. Mince D. Rumpiak.

Jakarta, 2 Nopember 1991.

## KELOMPOK V

### I. Hubungan Antarbudaya

1. Kontak-kontak budaya antarbangsa telah berlangsung sejak lama dalam sejarah manusia. Intensitas kontak-kontak tersebut telah meningkat di masa kini dan akan semakin meningkat lagi di masa depan karena proses globalisasi.
2. Dalam kontak-kontak budaya antarbangsa sebagaimana dimaksud di atas, sikap saling menghargai perlu dibina dan dikembangkan sehingga penyerapan hal-hal yang positif dan sesuai dengan budaya masing-masing dapat terjadi. Berbagai nilai positif kebudayaan nasional seperti nilai-nilai Pancasila terutama keagamaan perlu diusahakan untuk diterima sebagai bagian dari kebudayaan dunia.
3. Dalam hubungan kontak-kontak kebudayaan dan pengembangan sikap saling menghargai antarbudaya, kerjasama kebudayaan antarbangsa perlu dikembangkan di masa kini dan masa depan. Dalam kerjasama dimaksud, keterbukaan dan kreativitas budaya perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.
4. Usaha-usaha untuk mencari dan mengembalikan benda-benda budaya Indonesia yang tersimpan di luar negeri perlu terus ditingkatkan oleh Pemerintah.
5. Dalam hubungan pengembalian benda-benda budaya dimaksud, kesiapan untuk penyimpanan dan pemeliharaan benda-benda itu di dalam negeri perlu ditingkatkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

### II. Pengembangan Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri

1. Pengembangan Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri bertujuan:
  - a. Meningkatkan saling pengertian antarbangsa;
  - b. Meningkatkan citra Indonesia di Luar Negeri;
  - c. Meningkatkan kemampuan ekonomi Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara lain, dalam rangka meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia.
2. Dalam pengembangan kebudayaan Indonesia di Luar Negeri tiga taraf pemerolehan perlu diperhatikan:

- a. Pengenalan
- b. Pemahaman
- c. Penghayatan dan Pengamalan.

Penyusunan prioritas sasaran pengembangan kebudayaan hendaklah didasarkan juga pada taraf-taraf pemerolehan.

3. Untuk pengembangan kebudayaan Indonesia di Luar Negeri dapat dipakai berbagai cara antara lain pengadaan pusat informasi budaya di dalam negeri dan juga di luar negeri, pameran kebudayaan, misi kesenian, peningkatan kualitas media masa dan forum-forum antarbudaya dan pengajaran bahasa Indonesia.
4. Pengembangan kebudayaan dilakukan oleh badan pemerintah dan swasta serta lembaga-lembaga pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam usaha-usaha pengembangan kebudayaan, keterbukaan kreativitas dapat meningkat, dan tanpa kreativitas kebudayaan tidak akan berkembang.
5. Aspek-aspek budaya yang dikembangkan hendaklah mencakup seluruh kebudayaan Indonesia dalam arti meliputi daerah-daerah Nusantara, baik yang bersifat material maupun nilai, yang bersifat tradisional maupun yang masa kini.

### III. Pariwisata

1. Walaupun pariwisata diharapkan untuk menghasilkan keuntungan-keuntungan ekonomis, namun pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional harus tetap ditingkatkan dalam usaha-usaha pariwisata.
2. Dalam pengembangan usaha-usaha pariwisata secara ekonomi, kepentingan masyarakat umum, khususnya yang berpenghasilan rendah harus diperhatikan, dan kelestarian lingkungan harus diperhatikan.
3. Adalah suatu kenyataan umum bahwa pariwisata selalu membawa dampak positif dan negatif. Dalam usaha-usaha pariwisata harus selalu dipertahankan agar dampak negatif dihindari atau setidaknya diminimumkan. Dalam hubungan ini masyarakat perlu diberikan kesempatan untuk turut serta dalam mengambil keputusan. Di

samping itu kebijakan-kebijakan untuk membina usaha-usaha pariwisata perlu ditetapkan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya.

4. Tersedianya berbagai fasilitas umum seperti akomodasi, transportasi dan alat komunikasi yang teratur, kebersihan dan keindahan, dan aspek budaya lainnya perlu disiapkan dan ditingkatkan.

#### IV. Penerjemahan

1. Usaha penerjemahan berbagai literatur terutama dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi serta karya-karya budaya lainnya dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia perlu ditingkatkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Demikian juga, dalam rangka pengembangan kebudayaan Indonesia di Luar Negeri karya-karya budaya Indonesia perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing terutama ke dalam bahasa Inggris.
2. Dalam rangka meningkatkan usaha-usaha penerjemahan pusat penerjemahan (atau biro penerjemahan) perlu dibentuk sebagai bagian dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Tugas utama biro ini ialah merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan nasional tentang penerjemahan.
3. Organisasi penerjemahan yang berfungsi sebagai badan akreditasi penerjemahan perlu dibentuk oleh masyarakat.
4. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi, dan pakar dalam berbagai bidang perlu diikutsertakan dalam usaha-usaha penerjemahan.
5. Program studi penerjemahan perlu dibuka di lembaga-lembaga pendidikan tinggi untuk mendidik calon-calon penerjemah profesional.
6. Pemerintah perlu menyediakan anggaran khusus untuk usaha penerjemahan.

Kelompok V: 1. Ketua : Prof. Dr. Daulat P. Tampubolon  
2. Wakil Ketua : Dr. Salmurgianto  
3. Sekretaris : Irid Rachman Agoes SS, MA.

Jakarta, 2 Nopember 1991.

**POKOK MASALAH DAN TOPIK PEMBICARAAN**

## POKOK MASALAH DAN TOPIK PEMBICARAAN

1. WARISAN BUDAYA : PENYARINGAN DAN PEMELIHARAAN
  - 1.1. Pemeliharaan dan Pelestarian Warisan Budaya Nasional.
  - 1.2. Kebudayaan Daerah dalam kehidupan Masyarakat pendukungnya.
  - 1.3. Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Kerajinan.
  - 1.4. Aturan-aturan Adat berkenaan dengan kekuasaan dan pemilihan.
  - 1.5. Warisan Budaya Agama dan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
  
2. KEBUDAYAAN NASIONAL : KINI DAN MASA DEPAN
  - 2.1. Kebudayaan Daerah dan Kebudayaan Nasional.
  - 2.2. Arah Perkembangan Kebudayaan Nasional.
  - 2.3. Kesusasteraan Indonesia dalam Kebudayaan Nasional.
  - 2.4. Media massa dan Kebudayaan Nasional.
  - 2.5. Kebudayaan Nasional dan Sistem Pendidikan Nasional.
  - 2.6. Keterkaitan antara Kebudayaan dengan Pembangunan Nasional.
  
3. DAYA CIPTA DAN PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN
  - 3.1. Daya Cipta dan Pertumbuhan Kesenian Daerah dan Nasional.
  - 3.2. Peranan Seniman dalam Masyarakat.
  - 3.3. Daya Cipta, Ilmu dan Teknologi dalam Pertumbuhan Kebudayaan di Indonesia.
  - 3.4. Daya Cipta Budaya dan Media Massa.
  - 3.5. Generasi Muda dan Daya Cipta Budaya.
  - 3.6. Daya Cipta dan Pertumbuhan Kesusasteraan Daerah dan Nasional.
  
4. KEBUDAYAAN DAN SEKTOR-SEKTOR KEHIDUPAN MASYARAKAT.
  - 4.1. Kebudayaan dan Ekonomi.
  - 4.2. Kebudayaan dan Ilmu dan Teknologi.
  - 4.3. Kebudayaan dan Sosial Politik dan Hukum.
  - 4.4. Kebudayaan dan Hankam.
  - 4.5. Kebudayaan dan Wanita.

- 4.6. Kebudayaan dan Olah Raga.
- 4.7. Kebudayaan dan Lingkungan Alam.

5. KEBUDAYAAN INDONESIA DAN DUNIA (UMAT MANUSIA).

- 5.1. Kebudayaan Asing dan Kebudayaan Indonesia.
- 5.2. Kebudayaan Indonesia di Luar Negeri.
- 5.3. Pariwisata dan Kebudayaan di Indonesia.
- 5.4. Kerjasama Kebudayaan Antarbangsa.
- 5.5. Penerjemahan Karya-karya Asing dan Indonesia.

PANITIA KONGRES KEBUDAYAAN 1991

## PANITIA KONGRES KEBUDAYAAN 1991

Panitia Kongres Kebudayaan 1991 terdiri dari Panitia Pengarah dan Panitia Penyelenggara.

### A. PANITIA PENGARAH

|  |             |
|--|-------------|
| 01. Prof. Dr. Fuad Hasan                   | Ketua       |
| 02. Drs. GBPH Poeger                       | Wakil Ketua |
| 03. Prof. Dr. S. Budhisantoso              | Sekretaris  |
| 04. Prof. Dr. Umar Kayam                   | Anggota     |
| 05. Barnabas Suebu, SH                     | Anggota     |
| 06. Dr. Nurcholis Majid                    | Anggota     |
| 07. H. Budiardjo                           | Anggota     |
| 08. A.A. Navis                             | Anggota     |
| 09. Drs. Jakob Oetama                      | Anggota     |
| 10. Prof. Dr. Mattulada                    | Anggota     |
| 11. Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar           | Anggota     |
| 12. Goenawan Moehamad                      | Anggota     |
| 13. Ki Suratman                            | Anggota     |
| 14. Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH | Anggota     |
| 15. Prof. Ali Hasjmy                       | Anggota     |
| 16. Ny. R.A. Tahir                         | Anggota     |
| 17. Abdurrachman Wahid                     | Anggota     |

### B. PANITIA PENYELENGGARA

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 01. Ketua              | Prof. Dr. S. Budhisantoso         |
| 02. Ketua I            | Drs. Bastomi Ervan                |
| 03. Ketua II           | Drs. FX. Soetopo<br>Cokrohamijoyo |
| 04. Sekretaris I       | Drs. Nunus Supardi                |
| 05. Sekretaris II      | Drs. Ahmad Yunus                  |
| 06. Bidang Sekretariat | Drs. Sunaryo                      |
| a. Seksi Korespondensi | Achmadun                          |

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Seksi Registrasi</li> <li>c. Seksi Kesehatan</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dra. Tatiek Kartikasari</li> <li>dr. Sutopo</li> </ul>  |
| <p>07. Bidang Keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seksi Perencanaan</li> <li>b. Seksi Pembayaran</li> <li>c. Seksi Pertanggungjawaban</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drs. Suloso</li> <li>Drs. Kasimin</li> <li>A. Fatoni</li> <li>Mudjiono</li> </ul>   |
| <p>08. Bidang Logistik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seksi Akomodasi</li> <li>b. Seksi Konsumsi</li> <li>c. Seksi Perjalanan</li> <li>d. Seksi Perlengkapan</li> <li>e. Seksi Keamanan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ibrahim Harahap</li> <li>Sudri</li> <li>Dra. Riri Novari</li> <li>Manan</li> <li>Bambang Djumeneng</li> <li>Sunartik Sukotjo</li> <li>Drs. Parlin Simanjuntak</li> </ul>                                  |
| <p>09. Bidang Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seksi Humas</li> <li>b. Seksi Dokumentasi</li> <li>c. Seksi Protokol</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>A. Irvan Masduki, SH</li> <li>Sukarna Sjarief, SH, MA.</li> <li>Drs. Badri</li> <li>Budhi Iswanto</li> <li>Drs. Soimun</li> <li>Dra. Elly Wahyuni</li> </ul>  |
| <p>10. Bidang Teknis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seksi Makalah</li> <li>b. Seksi Persidangan</li> <li>c. Seksi Pelaporan</li> <li>d. Seksi Reproduksi</li> </ul>                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dr. Anhar Gonggong</li> <li>Dr. Hasan Alwi</li> <li>Dra. Sri Sutjiatiningsih</li> <li>Dr. Nafron Hasjim</li> <li>Drs. Sindu Galba</li> <li>Drs. Arinton Pudja</li> <li>Drs. Tito A. Panggabean</li> </ul> |
| <p>11. Bidang Pergelaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seksi Materi</li> <li>b. Seksi Penyajian</li> <li>c. Seksi Partisipasi</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drs. Pudjo Susantyo</li> <li>Sentot Sudiharto</li> <li>Djoko Muljono</li> <li>IGB. Adi Perbawa</li> </ul>   |
| <p>12. Bidang Pameran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Seksi Materi</li> <li>b. Seksi Penyajian</li> <li>c. Seksi Kunjungan Budaya</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drs. Tedjo Susilo</li> <li>Drs. Sukatno TW.</li> <li>Djoko Subandono</li> <li>Drs. Haris Sukendar.</li> </ul>   |

